

Socialization of Strengthening the Role of the Community in Maintaining the Sustainability of Democracy Based on Constitutional Law

Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Menjaga Keberlanjutan Demokrasi Berdasarkan Hukum Tata Negara

¹ Fitri Kartika Sari

² Mohammad Arqon

³ Amar Bintang

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Merangin

Email Correspondence: fitri.ks4@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 25 November 2024

Direvisi: 24 Desember 2024

Diterbitkan: 24 Januari 2025

Keywords:

Democracy;

Community Participation;

Constitutional Law.

Kata Kunci:

Demokrasi;

Partisipasi Masyarakat;

Hukum Tata Negara.

Abstract:

Sustainable democracy requires the active participation of the community in the supervision and implementation of the principles of constitutional law. In Sungai Piul, public awareness of their role in maintaining the sustainability of democracy still needs to be strengthened. Therefore, this socialization activity aims to increase public understanding of the importance of involvement in the democratic process, both through policy supervision and participation in elections and other democratic mechanisms. The method used in this activity is a qualitative approach with a descriptive-analytical method to describe the role of constitutional law in supporting community participation. The results of the socialization show that increasing public understanding of democratic principles can increase active involvement in maintaining the sustainability of democracy at the local level.

Abstrak:

Demokrasi yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan implementasi prinsip-prinsip hukum tata negara. Di Sungai Piul, kesadaran masyarakat terhadap peran mereka dalam menjaga keberlanjutan demokrasi masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi, baik melalui pengawasan kebijakan maupun partisipasi dalam pemilu dan mekanisme demokratis lainnya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan peran hukum tata negara dalam mendukung partisipasi masyarakat. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dapat meningkatkan keterlibatan aktif dalam menjaga keberlanjutan demokrasi di tingkat lokal.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai keputusan politik dan kebijakan negara. Namun, keberlanjutan demokrasi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat yang dilandasi oleh pemahaman hukum yang baik. Di Indonesia, hukum tata negara merupakan bagian penting dalam menjaga jalannya sistem demokrasi, karena memberikan kerangka hukum bagi pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah peran serta masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan ketentuan hukum tata negara. Masyarakat yang memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum negara akan menjadi penjaga dan penggerak utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkelanjutan.

Sosialisasi mengenai pentingnya penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan demokrasi berdasarkan hukum tata negara menjadi sangat relevan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang terikat dengan hukum. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip hukum tata negara, diharapkan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan aspirasi mereka, dan berkontribusi pada proses demokrasi yang lebih baik. Pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga pada berbagai mekanisme pengawasan dan partisipasi dalam proses kebijakan publik. Dengan memahami hukum tata negara, masyarakat dapat lebih kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendidikan hukum tata negara harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk di wilayah seperti Sungai Piul.

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya peran serta mereka dalam memperkuat demokrasi melalui pemahaman hukum yang tepat. Pengetahuan tentang hak-hak politik, prosedur pemilihan umum yang adil, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bernegara. Pemberdayaan masyarakat dengan pengetahuan ini akan memperkuat sistem demokrasi dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan serta ketidakadilan dalam pemerintahan.

Peran hukum tata negara dalam menjaga keberlanjutan demokrasi tidak hanya terbatas pada pembentukan undang-undang, tetapi juga pada pengawasan dan penegakan hukum. Masyarakat yang teredukasi dengan baik tentang hukum tata negara akan lebih mudah berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pemerintahan dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak berwenang. Hal ini menjadi sangat penting, terutama di daerah seperti Sungai Piul, yang mungkin masih terbelah dalam pemahaman tentang hak-hak politik mereka. Sosialisasi yang tepat dapat membuka wawasan masyarakat mengenai bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga demokrasi yang sehat. Pentingnya pemahaman hukum tata negara dalam konteks demokrasi adalah untuk menghindari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi yang sehat

memerlukan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hukum tata negara berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batas dan menciptakan ketidakadilan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar ini dapat berperan dalam memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkenalkan masyarakat pada hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum, mengajukan pendapat, dan memperoleh perlindungan hukum dari tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai hak-hak tersebut sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di Sungai Piul, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum tata negara dan hak-hak politik mereka masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, sosialisasi ini menjadi suatu langkah penting untuk memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum tata negara yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memahami hukum akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka dari tindakan diskriminatif dan tidak adil, serta dapat mengambil bagian dalam upaya menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang sehat.

Keberlanjutan demokrasi juga sangat bergantung pada kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat. Masyarakat yang teredukasi dengan baik tentang hukum tata negara akan lebih memahami betapa pentingnya menjaga integritas sistem pemerintahan dan menuntut keadilan. Oleh karena itu, pendidikan hukum menjadi salah satu kunci dalam memperkuat demokrasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah-daerah yang mungkin lebih terpencil seperti Sungai Piul. Selain itu, penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan demokrasi juga harus melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum tata negara mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar tersebut, masyarakat dapat lebih mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Sosialisasi mengenai hal ini di Sungai Piul sangat penting agar masyarakat tidak hanya pasif, tetapi aktif dalam menjaga demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Melalui pemahaman tentang hukum tata negara, masyarakat juga dapat mengerti cara-cara yang sah dalam menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Hal ini sangat relevan di tengah tantangan sosial dan politik yang sering muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, peran masyarakat sebagai pengawas demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan merata. Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang lebih terhadap pendidikan hukum bagi masyarakat di daerah-daerah seperti Sungai Piul. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat akan semakin terbuka untuk memahami berbagai aspek hukum tata negara yang menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Hal ini akan membentuk masyarakat yang lebih cerdas dalam mengawal jalannya pemerintahan dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Pendidikan hukum tata negara yang diberikan harus bersifat inklusif dan mudah dipahami, agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas. Sosialisasi yang dilakukan dengan pendekatan yang tepat dapat memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran hukum yang lebih baik di Sungai Piul. Sebagai hasilnya, masyarakat akan lebih siap untuk menjaga dan memperkuat sistem demokrasi yang ada, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran serta masyarakat di Sungai Piul dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara lebih luas makna dan proses yang terlibat dalam partisipasi politik masyarakat. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga berusaha memberikan gambaran yang holistik mengenai dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat dalam konteks demokrasi yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa metode yang saling mendukung untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Pertama, dilakukan observasi langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi seperti pemilu, musyawarah desa, dan pengawasan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Observasi ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, teknik observasi memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung dinamika interaksi antara masyarakat dan lembaga-lembaga politik setempat.

Selain observasi, dilakukan pula sosialisasi dengan masyarakat setempat untuk memperoleh perspektif mengenai pandangan mereka terhadap peran serta mereka dalam demokrasi. Kegiatan sosialisasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman, kendala, serta tantangan yang mereka hadapi dalam berpartisipasi dalam proses politik. Melalui diskusi yang interaktif, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam mengenai persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak politik mereka. Dalam hal ini, sosialisasi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga kelangsungan demokrasi.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan fenomena yang ada secara mendalam dan memberikan interpretasi terhadap peran masyarakat dalam sistem demokrasi. Metode deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara sistematis dan menyajikan hasilnya dalam bentuk yang jelas dan terstruktur. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Sungai Piul dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam

memperkuat peran serta masyarakat dalam proses demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

PEMBAHASAN

Demokrasi di Indonesia semakin mengalami tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks penguatan peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutannya. Salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan demokrasi adalah melalui sosialisasi yang dapat membangun kesadaran politik masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih minim partisipasinya, seperti Sungai Piul. Sosialisasi ini menjadi penting karena dalam demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dan proses politik lainnya merupakan kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kehendak rakyat (Hasanah, Mulka, Yudhistira, Inderawaspada, & Rudini, 2020). Keberhasilan sosialisasi ini akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pendidikan politik bagi masyarakat merupakan langkah awal dalam memperkenalkan mereka pada pentingnya peran serta mereka dalam demokrasi. Proses pendidikan politik ini harus dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti agar masyarakat di Sungai Piul, yang mungkin memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, dapat ikut serta dengan aktif dalam sistem demokrasi (Satria, Fikri, Kaniska, & Suryanto, 2025). Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pemilih yang sadar akan hak-hak politiknya dan dampak keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Hukum tata negara memiliki peran penting untuk mengatur bagaimana negara dijalankan dan bagaimana hak serta kewajiban warga negara dipertahankan. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi pemahaman yang baik mengenai hukum tata negara agar mereka dapat mengerti hak-hak mereka sebagai pemilih dan sebagai warga negara dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Hal ini termasuk pemahaman tentang konstitusi, sistem perwakilan rakyat, serta proses pemilu yang adil dan transparan (Muhammad, Firdaus, & La Aci, 2023). Masyarakat yang memahami hukum tata negara akan lebih mudah menjalankan hak politik mereka secara bijaksana.

Sosialisasi yang dilakukan di Sungai Piul harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti diskusi kelompok, pelatihan, dan seminar mengenai hak dan kewajiban dalam demokrasi. Kegiatan ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat terus mendapatkan informasi yang relevan dan up-to-date terkait dengan hukum dan demokrasi. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi tantangan politik yang ada, termasuk yang berkaitan dengan politik uang yang kerap merusak integritas pemilu (Khayyan et al., 2023).

Pendidikan demokrasi juga harus melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemuda. Ini penting agar ada pembentukan jaringan sosial yang dapat saling mendukung dalam memperkuat budaya politik yang sehat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih dengan cerdas, tanpa terpengaruh oleh praktik politik uang, adalah kunci untuk menjaga integritas pemilu dan mencegah praktik-praktik yang merugikan demokrasi (Arqon, Mustafa, & Gogon, 2024). Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya pada proses demokrasi dan merasa bahwa suara mereka dihargai.

Penting untuk juga mencatat bahwa sosialisasi ini harus berbasis pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar bagi segala bentuk kebijakan publik. Hukum tata negara menjamin adanya hak-hak politik bagi setiap warga negara, yang harus dijalankan dengan baik agar sistem pemerintahan yang demokratis tetap berjalan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum ini sangat penting bagi masyarakat agar mereka bisa melibatkan diri secara maksimal dalam menjaga keberlanjutan demokrasi (Chandra, Yanni, & Gusriyani, 2024).

Tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan demokrasi adalah ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses informasi politik yang akurat dan terpercaya. Di daerah seperti Sungai Piul, keterbatasan akses terhadap informasi ini sering kali menghambat masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan berbagai media, termasuk media sosial, untuk memberikan informasi yang mudah diakses oleh mereka yang tinggal di daerah terpencil (Ulfyyati, Muhamad, & Akbari, 2023). Hal ini akan memperkuat peran masyarakat dalam proses demokrasi.

Dalam perspektif hukum, peran masyarakat juga diatur oleh berbagai kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan adalah kebijakan tentang partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan politik. Masyarakat yang memahami bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik akan lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan (Dahri, Sayuti, & Chandra, 2023). Oleh karena itu, pemahaman tentang kebijakan publik dan peran masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memperkuat demokrasi.

Sosialisasi tentang demokrasi juga harus mencakup pendidikan tentang bahaya dari politik uang dan praktik-praktik negatif lainnya yang bisa merusak proses pemilu. Politisi yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilu tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik itu sendiri. Oleh karena itu, sosialisasi yang menekankan pada pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari pengaruh uang akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik (Mangkurat & Mirajiah, 2023).

Kesadaran politik yang tinggi dapat tercapai apabila masyarakat memahami bahwa keberlanjutan demokrasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran aktif mereka sebagai bagian dari masyarakat. Ini berarti bahwa setiap warga negara, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, harus merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sistem demokrasi. Sosialisasi yang berbasis pada hukum tata negara akan memastikan bahwa masyarakat tahu hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan peran tersebut, yang pada gilirannya akan memperkuat demokrasi Indonesia (Khayyan et al., 2023).

Penguatan peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan demokrasi juga mencakup aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial. Masyarakat yang sejahtera akan lebih mudah untuk terlibat dalam proses politik secara aktif. Oleh karena itu, selain pendidikan politik, penting juga untuk memfasilitasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah seperti Sungai Piul. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja

yang lebih luas serta membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dengan lebih baik (Hasanah et al., 2020).

Sosialisasi yang dilakukan di Sungai Piul harus melibatkan kolaborasi yang erat antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga yang terkait. Partisipasi aktif dari pemerintah daerah sangat penting dalam menyukseskan upaya ini. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator yang mengorganisir berbagai kegiatan pendidikan politik yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam demokrasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan forum diskusi yang membahas berbagai isu terkait demokrasi dan hukum tata negara. Kegiatan semacam ini akan menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi yang tepat dan relevan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem politik Indonesia.

Pentingnya pelatihan dan seminar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan secara langsung kepada masyarakat mengenai bagaimana sistem politik dan hukum di Indonesia beroperasi. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan mekanisme pemerintahan akan lebih siap untuk berperan aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, kegiatan-kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pandangan mengenai berbagai isu yang memengaruhi kehidupan mereka. Diskusi yang terbuka ini membantu memperkaya wawasan masyarakat tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam proses demokrasi, terutama dalam pemilihan umum dan pengawasan kebijakan publik.

Selain mengadakan pelatihan dan seminar, pemerintah daerah juga harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung kelancaran proses sosialisasi. Fasilitas ini dapat berupa ruang yang nyaman untuk pertemuan, akses ke materi pendidikan politik, serta sarana komunikasi yang efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Adanya fasilitas yang memadai akan mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tanpa ada kendala teknis. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang sama untuk mengikuti kegiatan ini. Dengan adanya dukungan yang tepat, proses sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar politik serta terlibat aktif dalam memperkuat demokrasi.

Pada akhirnya, keberlanjutan demokrasi di Indonesia akan sangat bergantung pada kesadaran politik masyarakat yang tinggi, yang diperoleh melalui sosialisasi yang efektif dan berbasis pada hukum tata negara. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup akan lebih mampu menjaga sistem demokrasi agar tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat peran masyarakat dalam proses demokrasi melalui pendidikan dan sosialisasi yang tepat guna mencapai demokrasi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak (Chandra & Harmaini, 2020).

Keberlanjutan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberhasilan pemilu, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas dan kualitas pemerintahan. Tanpa keterlibatan masyarakat yang tinggi, demokrasi akan mudah tergerus oleh berbagai kepentingan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dalam menjaga demokrasi harus menjadi prioritas

utama dalam agenda sosial dan politik di Sungai Piul dan daerah-daerah lainnya (Muhammad et al., 2023).

Keberlanjutan demokrasi bukan hanya soal pemilu yang sukses, tetapi juga soal bagaimana proses politik berfungsi secara transparan dan akuntabel. Di Sungai Piul, tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan demokrasi adalah rendahnya tingkat partisipasi politik dan kesadaran hukum yang terbatas. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak-hak politik mereka, masyarakat sering kali terjebak dalam praktik-praktik yang tidak sehat, seperti politik uang, yang dapat merusak integritas pemilu. Untuk itu, sosialisasi yang dilakukan harus tidak hanya mengedukasi tentang hak-hak politik, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab terhadap demokrasi sebagai sistem yang melibatkan seluruh warga negara.

Pendidikan politik yang efektif di Sungai Piul dapat membantu masyarakat memahami bahwa mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, untuk mencapai hal ini, proses sosialisasi harus disesuaikan dengan konteks lokal, yakni dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Misalnya, untuk daerah yang relatif terpencil seperti Sungai Piul, penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi ponsel atau media sosial, bisa menjadi sarana penting dalam menyampaikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini akan membantu mereka untuk tetap terinformasi tentang peristiwa-peristiwa politik penting, bahkan di tengah keterbatasan geografis.

Pendidikan politik yang efektif tidak hanya memberikan informasi tentang hak dan kewajiban dalam proses demokrasi, tetapi juga memfasilitasi masyarakat untuk memahami dampak keputusan politik terhadap kehidupan mereka. Di Sungai Piul, di mana sebagian besar penduduk mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya partisipasi politik, pendidikan ini menjadi sebuah jembatan untuk memperkenalkan mereka pada isu-isu politik lokal dan nasional. Melalui pendekatan yang berbasis pada dialog dan keterlibatan langsung, masyarakat dapat lebih mudah memahami bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah mempengaruhi sektor-sektor kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pendidikan politik yang dilakukan di tingkat lokal juga membantu menciptakan pemilih yang lebih kritis dan bijaksana. Tidak hanya mengajarkan mereka tentang prosedur pemilihan, tetapi juga mengenai cara menilai calon pemimpin dan kebijakan yang mereka tawarkan. Dengan meningkatkan pengetahuan politik masyarakat, diharapkan mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor negatif seperti politik uang atau propaganda yang menyesatkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kegiatan pendidikan ini untuk melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga media lokal, yang dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat.

Dengan meningkatnya kesadaran politik, masyarakat Sungai Piul tidak hanya akan menjadi pemilih yang aktif, tetapi juga berperan dalam menciptakan demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Proses pendidikan politik yang berkelanjutan akan membentuk budaya politik yang sehat, di mana warga negara memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang ikut serta dalam diskusi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Hal ini juga membuka peluang untuk meningkatkan

transparansi dalam pemerintahan dan memperkuat akuntabilitas para pejabat publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, penguatan peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan demokrasi berbasis pada hukum tata negara sangat penting, khususnya di daerah seperti Sungai Piul. Melalui sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban politik mereka dalam kerangka demokrasi yang sehat. Pendidikan politik yang tepat akan membantu membangun kesadaran politik, menciptakan pemilih yang cerdas, dan mencegah praktik negatif seperti politik uang yang merusak integritas pemilu. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum tata negara akan memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Penguatan demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat. Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat akan lebih mampu menjaga dan memperkuat sistem demokrasi yang ada. Sosialisasi yang berbasis pada hukum tata negara dan pemberdayaan masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan politik yang inklusif, adil, dan transparan. Dengan demikian, keberlanjutan demokrasi di Indonesia, termasuk di Sungai Piul, dapat terjaga dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Merangin atas dukungan yang diberikan dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Sungai Piul, Bangko. Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara pihak universitas, masyarakat setempat, dan rekan-rekan yang terlibat. Semoga hasil dari PKM ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

KONFLIK INTEREST

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Fadlail. (2024). Demokrasi Pancasila: Landasan Nilai Dan Prinsipnya Dalam Membangun Sistem Dan Etika Politik Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 403–413. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3995>
- Arqon, M., Mustafa, D., & Gogon, M. (2024). Pencegahan politik uang di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 12-22. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.17>
- Chandra, F., & Harmaini, H. (2020). Problematika tatanan birokrasi sebagai instrumen politik di Indonesia. *ADIL*, 2(1), 1-12.

- Chandra, F., Yanni, F., & Gusriyani, N. (2024). Hukum dan demokrasi Indonesia masa depan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.19>
- Dahri, M., Sayuti, S., & Chandra, F. (2023). Penerapan kitab undang hukum pidana dan kitab undang hukum acara pidana dalam penyelesaian perkara pidana pemilu. *Wajah Hukum*, 7(2), 508-519. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1294>
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.
- Harmaini, H., Chandra, F., Kusaimah, K., & Susanti, J. (2024). Sosialisasi Undang Undang Cipta Kerja di Desa Kampung Tengah Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin. *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-18. <https://doi.org/10.70308/.v1i1.20>
- Hasanah, N., Mulka, S. R., Yudhistira, H., Inderawaspada, I., & Rudini, R. (2020). Pendidikan politik bagi masyarakat kecamatan Samarinda Utara di Kota Samarinda. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 446-452. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.1156>
- Held, D. (2006). *Models of democracy*. Stanford University Press.
- Khayyan, D., Pangestu, F. D., Alhayyu, K. N., Ma'ruf, M. A. M., Kaznasani, M., Sari, P. D. P., ... & Kesetyaningsih, T. W. (2023, October). Peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban partisipasi pemilu dan konteks bahaya money politic. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat (Vol. 6, No. 2)*.
- Mangkurat, R. S. B., & Mirajiah, R. (2023). Politik kontemporer: Tantangan dan prospek dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(2), 148-158.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), 354-368.
- Salman, & Farda, L. (2024). Sosialisasi Pemilu Serentak kepada Pemilih Pemula di Kabupaten Merangin. *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 117-128. <https://doi.org/10.70308/.v1i2.78>
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What democracy is... and is not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75-88.
- Ulfyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: Tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435-444.